
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Asep Hidayat

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: drasephi62@gmail.com

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat merupakan salahsatu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri berbagai macam kebijakan atau program telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan masalah kemiskinan perlu di pahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani secara global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya SDGs ini dapat membantu dalam kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan di Indonesia masih menjadi persoalan, yang disebabkan karena kemiskinan tidak ada ujungnya meskipun berbagai solusi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah terlaksana tetapi dalam implementasinya masalah kemiskinan masih terjadi di Indonesia. Dalam mengukur kesejahteraan atau mengukur kualitas hidup tentunya akan melibatkan unsur kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, dan hak-hak nya terpenuhi. Semua hal tersebut dapat dipenuhi dengan baik dan cepat apabila inspratruktur pembangunannya sudah baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Pembangunan, Sustainable Developmet Goals (SDGs).

Abstract

Community welfare is one of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs) and is a reflection of the success of development carried out by the government. In Indonesia, various policies or programs have been carried out by the government to overcome poverty in order to improve people's welfare. The handling of poverty needs to be understood as a world problem, so it must be handled globally as well. So that each poverty alleviation program must be understood as a whole and mutually interdependent with several other activity programs. The SDGs state no poverty as the first priority point. This means that the world has agreed to eliminate poverty in any form in all corners of the world, including Indonesia. This study aims to find out whether the existence of SDGs can help in community welfare. The research is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies. The results of the study can be concluded that welfare in Indonesia is still a problem, which is caused by poverty that has no end even though various solutions and policies issued by the government have been implemented but in practice the problem of poverty still occurs in Indonesia. In measuring welfare or measuring the quality of life, of course, it will involve elements of health, education, personal activities, and fulfilling their

rights. All of these things can be fulfilled properly and quickly if the construction infrastructure is good and can be felt directly by the community.

Keywords: *Prosperity, Development, Sustainable Development Goals (SDGs).*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan nampaknya masih menjadi beban dunia dan akan terus menjadi suatu persoalan yang tidak pernah hilang di dunia ini. Termasuk di Indonesia sendiri, kemiskinan menjadi permasalahan yang begitu serius sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tidak mengherankan jika berbagai macam kebijakan ataupun program telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini. Akan tetapi, implementasi dari berbagai kebijakan yang meluncurkan pemerintah selama ini banyak yang gagal (Agus & Ratih, 2015). Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) persoalan kemiskinan di Indonesia ini sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Masyarakat Indonesia di katakan miskin jika per bulannya mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan (Afrizal, 2018). Hingga pada akhirnya dunia meresponnya dengan menyepakati deklarasi The Millenium Development Goals (MDG's) pada Sepetember tahun 2000 yang diikuti 189 negara salahsatunya adalah Indonesia (Raharjo, 2015). Dimana salahsatu targetnya adalah mengurangi angka kemiskinan hingga setengahnya pada tahun 2015. Deklarasi ini memberikan indikasi bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi masalah besar dunia yang harus ditanggulangi bersama. Namun seiring berakhirnya era MDGs pada tahun 2015 lalu, persoalan kemiskinan kembali di tetapkan sebagai tujuan utama dalam TPB atau SDGs (Raharjo, 2015). Karena hasil dari evaluasi dan monitoring capaian RAD MDGs DIY 2010-2015, salahsatu indikator yang belum tercapai yaitu penurunan kemiskinan.

Di Indonesia sendiri walaupun sebelumnya telah mengalami penurunan namun penurunan tersebut terjadi tidak cukup signifikan. Hingga pada tahun 2015 jumlah angka kemiskinan Indonesia mencapai 28,59 juta atau 11,22 persen dari total jumlah masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, presentase tingkat kemiskinan di desa pada bulan Maret 2020 lalu sebesar 12,82 persen, sedangkan di wilayah kota itu sebesar 7,38 persen (SDGs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan, 2020). Dari data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dari segi sosial, ekonomi, hingga infrastruktur dan teknologi yang berdampak pada tingginya jumlah kemiskinan di tingkat pedesaan. Berbagai program pembangunan di pedesaan khususnya perlu ditingkatkan dan di pantau lebih lanjut guna mengurangi ruang ketimpangan. Dengan adanya program dana desa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan di wilayah desa maupun kota (Ngoyo, 2015). Adapun terkait efektif atau tidaknya itu sudah menjadi bagian tanggung jawab dari pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Keberhasilan pemerintahan desa dalam mengelola dana desa secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Karena dengan begitu kesempatan kerja menjadi terbuka dengan adanya peluang modal usaha ataupun kebutuhan akan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan desa (Pangestu, dkk., 2021). Setelah semuanya itu terpenuhi bukan tidak mungkin kemiskinan serta ketimpangan di pedesaan akan surut (Afrizal, 2018). Implementasi SDGs di Indonesia sendiri sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari laporan Gatra tahun 2020 lalu dimana Indonesia dalam peringkat SDGs berada pada urutan 101 dengan skor indeks 65,3 (Wahyuningsih, 2018). Hal tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui serangkaian kebijakan dan sejumlah peraturan yang berfokus pada pengawasan dan pencapaian SDGs, seperti telah ditetapkannya empat target SDGs yang telah diutamakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

yang tidak hanya berfokus terhadap lingkup nasional pemerintah saja tetapi perhatian terhadap pembangunan dalam skala daerah dan lokal (Sorta, 2021; Kristianto, 2020).

Salah satu contoh kontribusi Indonesia terhadap SDGs ini yaitu dimana Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dana desa untuk di tahun yang akan mendatang bisa dirasakan oleh semua warga desa, sampai golongan terbawah (Arianto, 2019). Karena sebelumnya dana desa ini disinyalir belum sepenuhnya dirasakan oleh warga desa. Oleh karena itu, SDGs ini diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024 serta akan masuk ke dalam prioritas penggunaan desa tahun 2021. Terkait dengan hal itu, terdapat tiga fokus untuk anggaran dana desa tahun depan diantaranya; pemuliahan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan prioritas dana desa tahun 2021, adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19 (M. & Kordi, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No 13 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 bahwa arah pembangunan desa langsung diimplementasikan ke 74.953 desa-desa di Nusantara mulai tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat dengan tindakan pemerintah pusat, daerah, dan desa juga kelompok masyarakat dalam menggaungkan SDGs Desa. Seperti berbagai webinar dan sosialisasi dilakukan yang berkaitan dengan kepemimpinan, badan usaha milik desa (BUM-Des), ramah kepada perempuan. Hal tersebut membuat semakin konkrit bahwa pembangunan di desa sedang gencar-gencarnya dilakukan. Kemudian apa urgensi dari SDGs itu sendiri? Sejak tahun 1945, pengetahuan tentang pembangunan terus berkembang. Hal tersebut ditandai dengan PBB melalui konferensi tingkat tinggi pembangunan sejak 1960-an sampai 2000-an, baik mengenai lingkungan, social, anak, kependudukan, bencana, maupun iklim. Maka dari itu PBB merumuskan pembangunan sebagai Sustainable Development Goals pada tahun 2015. SDGs merupakan pembangunan yang holistic, lengkap sampai pada pengukurannya pun secara detail. Maka dari itu rumusan dari SDGs sangat luas, yaitu mencakup 17 tujuan global, yang terinci atas 169 indikator capaian, bahkan pada tahun 2020 PBB menetapkan indikator capaiannya meningkat yaitu menjadi 247 tujuan. Indonesia menempatkan SDGs sebagai arus utama untuk pembangunan, baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan Perpres No 59 Tahun 2017 menetapkan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan arahan untuk membuat rencana aksi nasional, provinsi, dan kabupaten. Adanya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi membentuk pusat studi pembangunan berkelanjutan.

Pada awalnya SDGs merupakan perubahan pembangunan secara global, yang dimana melepaskan dirinya dari ideology-ideologi yang dianggap bertolak belakang. Pada saat ini manajemen pembangunan global diarahkan pada kesamaan tujuan akhir dari pembangunan, yang dimana ideology kapitalisme dan sosialisasi sama-sama menghilangkan kemiskinan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, hingga menjaga lingkungan hidup sekitar lingkungannya (Safitri, dkk., 2022). Namun persoalannya pembangunan selama ini hanya sekedar narasi, dan hanya memperhitungkan peran negara atau antarnegara. Kalaupun ada pembahasan tentang pembangunan hanya sampai kepada pelaku ekonomi nasional atau pemerintahan daerah. Padahal ada desa yang berkontribusi sebanyak 74% terhadap SDGs nasional, sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam perhitungannya ada 91% wilayah pemerintahan desa sehingga pengelolaannya akan memenuhi tujuan energy bersih, pertumbuhan ekonomi, produksi, dan konsumsi. Kemudian tujuan berikutnya adalah pemerataan infrastruktur, permukiman, tanggap terhadap perubahan iklim, lingkungan daratan, lingkungan laut, perdamaian, dan kemitraan pembangunan. Sementara itu, 188 juta warga desa merupakan 43% penduduk Indonesia sehingga pemenuhan kebutuhan mereka menyumbang bagi tujuan penghilangan kemiskinan dan kelaparan, akses kesehatan, air bersih, dan pendidikan, serta kesetaraan gender. Namun sangat disayangkan sumbangan desa yang sangat besar itu kurangnya perhatian dan pengawasan. Tanpa menekankan peran desa, SDGs Indonesia selalu

menempati posisi terbawah di antara 116 negara. Pada 2016 posisinya sudah pada rangking 98, sedangkan pada 2020 tambah merosot menjadi rangking 101.

Jika disimpulkan tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain. Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan. Bila mengacu kepada pengalaman pelaksanaan MDGs yang telah berakhir pada 2015 ini, proses pembangunan yang disusun dengan target dan tujuan yang jelas belumlah dapat mencerminkan terlaksananya pembangunan berkelanjutan dengan catatan partisipasi masyarakat terkait hal tersebut masih minim. Dalam pendekatan pembangunan, ada baiknya kita menganalisis lebih jauh mengenai proses-proses keterlibatan subjek pembangunan dalam rangka partisipasi yang lebih luas. Indikator keberhasilan hanya mungkin dicapai melalui hasil kerjasama dari berbagai pihak yang secara terbuka aktif terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan di awal pembahasan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan. Hal tersebut mengaruskan adanya upaya yang solutif. Kesejahteraan di Indonesia masih menjadi persoalan, yang dimana disebabkan karena masalah kemiskinan tidak ada ujungnya meskipun berbagai solusi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah terlaksana tetapi dalam implementasinya masalah kemiskinan masih terjadi di Indonesia. Dalam mengukur kesejahteraan atau mengukur kualitas hidup tentunya akan melibatkan unsur kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, dan hak-hak nya terpenuhi. Semua hal tersebut dapat dipenuhi dengan baik dan cepat apabila inspratruktur pembangunannya sudah baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang dimana proses penemuan tidak menggunakan proses statistik atau kualitatif. Kemudian dianalisis deskriptif dengan pendekatan studi literature. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen instansi yang terkait, situs website, jurna, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan laporan-laporan yang terdapat pada website.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep SDGS

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu program mendunia jangka panjang guna meningkatkan sumber daya serta potensi yang ada pada setiap negara. SDG's ini merupakan sebuah kelanjutan dari adanya Millennium Development Goals (MDGs). Millennium Development Goals (MDGs) ini yaitu sebuah deklarasi hasil dari kesepakatan 189 negara PBB pada September tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015 karena pencapaian tujuan dari MDGs ini hanya mempunyai sasaran waktu hingga tahun 2015, kemudian di ganti dengan pembangunan global baru yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang di sepakati oleh 193 negara PBB salahsatunya Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017. Dimana sebelum MDGs ini berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 sudah dirumusan terkait rencana pembangunan dunia pasca 2015. Hal tersebut semakin diperkuat dengan di sepakatnya "*The FutureWe Want*" pada *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Dengan adanya kedua hal tersebut ini menjadi penggerak atas penyusunan rencana pembangunan pasca 2015 yang telah di sepakati pada September 2015 saat sidang PBB dengan agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat beberapa agenda MDGs yang belum tercapai dan akan dilanjutkan pencapaiannya oleh SDGs sampai tahun 2030 mendatang. Jadi hadirnya SDGs ini sebagai bentuk penyempurnaan dari MDGs karena:

- a. Inklusif, secara khusus menyasar pada kalangan rentan (*no one left behind*).
- b. SDGs ini sifatnya lebih komprehensif, karena dalam penyusunannya SDGs ini selalu mengikutsertakan banyak negara dengan tujuan yang universal bagi negara maju maupun negara berkembang.
- c. Mengutamakan pada hak asasi manusia, supaya tindakan diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan di segala dimensi.
- d. Memperluas sumber pendanaan
- e. Melibatkan segenap pemangku kepentingan seperti kalangan pemerintahan, akademisi, pelaku usaha, media dan organisasi masyarakat.
- f. SDGs memiliki target menuntaskan sepenuhnya tujuan (*Zero Goals*) sedangkan MDGs menargetkan hanya mengurangi atau setengahnya.
- g. SDGs tidak hanya memuat tujuan akan tetapi sarana pelaksanaan (*means of implementation*).

SDGs memiliki 169 target, 241 indikator, dan 17 tujuan sebagai bentuk melanjutkan usaha pencapaian dari Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015 lalu. 17 tujuan tersebut diantaranya: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan yang Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih juga Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi serta Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan guna Mencapai Tujuan (*Sekilas SDGs*, n.d.). Di Indonesia sendiri target dan tujuan dari SDGs sudah terlihat dalam target RPJMN 2015-2019. (SMERU Research Institute, 2017). Selain itu, terdapat beberapa pilar dalam SDGs diantaranya:

- a. **Pilar Pembangunan Sosial**
Pembangunan sosial SDGs ini yaitu tercapainya pemenuhan atas hak dasar manusia yang berkualitas dengan adil dan setara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Pilar Pembangunan Lingkungan**
Pembangunan lingkungan SDGs yaitu tercapainya pengelolaan terhadap sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
- c. **Pilar Pembangunan Ekonomi**
Pembangunan ekonomi SDGs yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bertaraf dengan keberlanjutan beberapa inovasi, peluang kerja serta usaha, infrastruktur yang memadai, industri inklusif, dan didukung kemitraan.
- d. **Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola**
Pembangunan hukum dan tata kelola SDGs yaitu terbentuknya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna terciptanya stabilitas keamanan. (*Sekilas SDGs*, n.d.)

2. Upaya Mewujudkan Persoalan Kesejahteraan di Indonesia

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa persoalan kesejahteraan di Indonesia belum terasa oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan karena masalah kemiskinan masih belum bisa teratasi. Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, begitupun dengan Indonesia. Penanganan kemiskinan menjadi persolana global sehingga dalam menanganinya pun harus dalam konteks global pula, sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan

saling interdependen dengan berbagai kegiatan. Dalam SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu: dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau, dan lain sebagainya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota PBB Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs. Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara integratif sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Upaya nasional ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang serius. Bahkan pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa, sekitar 47 triliun. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bagi Indonesia sendiri kemiskinan juga masih menjadi masalah serius. Meskipun secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, kecuali pada tahun 2006. namun secara absolute jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 38,74 juta jiwa. Jumlah ini terus menurun hingga pada tahun 2006 penduduk miskin di Indonesia naik menjadi 39,3 juta dan pada tahun 2021 terdapat 27,54 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan mengindikasikan adanya ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang pada akhirnya membawa dampak ke berbagai permasalahan. Kemiskinan akan mewariskan generasi yang kekurangan gizi, rentan terhadap penyakit, serta tidak mampu menikmati pendidikan. Pada akhirnya kemiskinan akan mewariskan generasi yang menjadi penyandang masalah sosial, bahkan menjadi sumber masalah sosial. Maka dapat disimpulkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia masalah yang harus dibereskan secara tuntas yaitu masalah kemiskinan, jika masalah kemiskinan sudah teratasi maka kesejahteraan akan terwujud dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Ngoyo et al., 1998).

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di lakukan oleh pemerintahan Indonesia masyarakat adalah sebagai kunci dari seluruh proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan kunci utama suksesnya pelaksanaan pembangunan karena menempatkan masyarakat sebagai penggerak atau sebagai subjek pembangunan bukan hanya sekedar objek. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif membuat masyarakat merasa memiliki serta ikut bertanggungjawab terhadap setiap proses

dan hasil-hasil pembangunan. Prioritas pembangunan desa saat ini sudah diarahkan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, pendekatan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan merupakan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Jadi, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai data BPS tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 260 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini akan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa dalam proses pelaksanaan pembangunan apabila seluruh masyarakat mau berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan. Sumber daya manusia yang dimiliki ini apabila diarahkan dengan optimal akan mampu menjadi kekuatan utama pendukung pembangunan nasional.

Namun keberadaan penduduk yang banyak ini kadang juga merupakan hambatan yang sangat mengganggu proses pembangunan. Penduduk yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi hambatan dalam pembangunan ini. Pembangunan nasional dengan partisipasi masyarakat yang tinggi akan menghasilkan masyarakat yang semakin berdaya sehingga menjadi kekuatan yang mampu mewujudkan tujuan nasional sesuai yang di cita-citakan. Proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan pola partisipatif yakni pola pembangunan yang mulai dari proses perencanaan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat secara partisipatif akan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Selama ini pelaksanaan Musrenbang di banyak desa belum mampu menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan perencanaan pembangunan ini hanya melibatkan segelintir elite yang ada di desa. Hal ini dapat diakibatkan oleh anggapan bahwa pelaksanaan Musrenbang hanya proses seremonial belaka sehingga masyarakat secara umum memiliki keengganan untuk melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa, sangat diperlukan peranan dari Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan Desa dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan, pendidikan politik sehingga masyarakat desa akan mengerti dan memahami bahwa partisipasi mereka dalam politik dapat menunjang pembangunan desa ke arah yang lebih baik (Kusmanto, 2013).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa salah satu kewajiban masyarakat adalah berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat akan mengarah kepada pemberdayaan masyarakat karena melalui partisipasi dalam seluruh proses, masyarakat akan semakin berdaya dan mampu mengendalikan proses tersebut kearah pencapaian kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan mengandung arti bahwa masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan untuk perubahan kearah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dan kekuatan untuk mensukseskan pembangunan (Sutrisna, 2021).

D. KESIMPULAN

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah suatu program mendunia jangka panjang guna meningkatkan sumber daya serta potensi yang ada pada setiap negara. Salahsatunya menyelesaikan kemiskinan yang menjadi sumber permasalahan hambatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penanganan kemiskinan menjadi persolana global sehingga dalam menanganinya pun harus dalam konteks global pula, sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan berbagai kegiatan. Dalam SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin

pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Proses pembangunan yang dilaksanakan di desa selain mendapatkan transfer dana dari pemerintah daerah juga dialokasikan dari APBN. Hal ini membuat desa bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi sudah menjadi subyek pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menunjang peningkatan perekonomian desa sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R. U. A. (2018). *SDGs dan Upaya Penurunan Kemiskina di Indonesia*. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4313874/sdgs-dan-upaya-penurunan-kemiskinan-di-indonesia>
- Agus, P. E., & Ratih, S. D. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik* (p. 189). Gava Media.
- Arianto, Z. (2019). *Upaya Pemerintahan Joko Widodo dalam Mendorong Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia*. retrieved from <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18987/11.JURNAL.pdf?sequence=1>
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) dalam Konsep Green Economy untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27-38.
- M., G., & Kordi, K. (2020). *Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Desa*. Retrieved from <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-dari-desa/>
- Ngoyo, M. F., Ekonomi, D. S., & Pendahuluan, I. (1998). *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*.
- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal sustainable development goals (SDGs); meluruskan orientasi pembangunan yang berkeadilan. *Sosioireligius*, 1(1).
- Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. (2021, June). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, No. 3, pp. 210-219).
- Raharjo, S. T. R. I. (2015). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. 0042, 159–167.
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096-7106.
- Kemendesa. *SDGs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan*. (2020). Retrieved from <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id?sdgs-desa-no-1-desa-tanpa-kemiskinan/>
- SMERU Research Institute. (2017). Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret. *Buletin SMERU Research Institute*, 2(2), 1–39.
- Sorta, T. (2021). *SDGs Indonesia Terusik Pandemi, Mampukah Capai Targetnya di 2030*. Katadata.Co.Id. <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/sortatobing/berita/60eecedb414ab/sdgs-indonesia-terusik-pandemi-mampukah-capai-targetnya-di-2030>
- Sutrisna, I. W. (2021). *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa*. 04(01), 1–10.
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Develompent Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 390-399.